

Daftar Isi

1.	KONTEKS STRATEGIS OGP di INDONESIA (2014-2015)	3
2.	OGP SEBAGAI BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA DAN AGENDA REFORMASI	5
3.	PROSES PERUMUSAN RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2014-2015	6
4.	STRUKTUR RENCANA AKSI	8
5.	PROSES TATA KELOLA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI	11
	Lampiran 1. RINCIAN RENAksi OGI 2014 - 2015	12
	Lampiran 2. PENCAPAIAN REKOMENDASI LAPORAN IRM 2011-2013	17

1. KONTEKS STRATEGIS OGP di INDONESIA (2014-2015)

Perjalanan Indonesia dalam melaksanakan inisiatif Open Government Partnership (OGP) semakin mengakar dan kuat sejak pertama kali gerakan tersebut diresmikan di bulan September 2011, dimana Indonesia menjadi salah satu anggota pendiri. Dengan capaian-capaian yang telah diraih dan fondasi yang telah dibangun hingga saat ini, gerakan Open Government Indonesia (OGI) kini yakin bahwa perjalanan menuju pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, serta partisipatif akan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa semangat reformasi dan demokrasi serta partisipasi publik sejak tahun 1998 telah melepaskan efek bola salju (Snowball effect) yang menjadikan gerakan OGI mengakar dan bertumbuh pesat. Selain itu, dinamika penambahan anggota OGP di dunia internasional hingga 64 anggota memiliki pengaruh positif terhadap Indonesia untuk mempertahankan keberlanjutan dan inovasi gerakan OGI.

Dimulai dengan langkah yang tegas di tahun 2011, perjalanan OGI untuk mengusung keterbukaan pemerintah di tahun 2012 dan merangkul masyarakat sebagai mitra sejajar, OGI saat ini telah berkembang jauh melebihi retorika publik belaka. Rencana aksi (renaksi) telah bergulir untuk kedua kalinya di tahun 2013, dan saat ini OGI sedang mempersiapkan renaksi 2014-2015 dan menjadikan ini sebagai renaksi ketiga sejak pertama kali OGP ditetapkan di tahun 2011. Renaksi yang telah berulang kali digulirkan ini telah mendemonstrasikan bahwa keyakinan yang bersifat kolektif dan nasional merupakan prasyarat pemerintahan modern yang dapat mengembangkan potensi ekonomi, pelayanan publik, dan inovasi. Di tahun 2013, telah diimplementasikan 21 renaksi terfokus kepada layanan dasar publik, termasuk di dalamnya beberapa inisiatif baru; mulai dari keterlibatan anak muda melalui kompetisi Model OGP (MOGP) sampai kompetisi berskala nasional untuk memancing ide-ide inovatif untuk mendukung keterbukaan pemerintah "SOLUSIMU".

“...Keterbukaan pemerintah merupakan kunci untuk mengembangkan potensi pemerintah untuk lebih partisipatif dan pelayanan publik yang lebih baik.

Di tahun 2014 dan 2015 ini, Indonesia menyusun program strategis reformasi keterbukaan pemerintahan yang lebih ambisius. Renaksi yang telah disusun kali ini berusaha menjawab 3 Tantangan Besar OGP; 1) Mengembangkan Pelayanan Publik; 2) Meningkatkan Integritas Publik; dan 3) Mengelola Sumber Daya Publik secara Efektif. Ketiga tantangan besar tersebut sebenarnya juga telah membantu penyusunan renaksi OGI dalam tiga tahun terakhir. OGI saat ini memanfaatkan momentum perubahan peta politik di tahun 2014, pergantian Presiden Republik Indonesia, dengan tetap menjalankan berbagai bentuk reformasi di bidang keterbukaan pemerintah. Salah satunya adalah dengan mengadakan SOLUSIMU dimana OGI mengajak masyarakat untuk mengungkapkan ide-ide brilian untuk kemudian dapat diterjemahkan menjadi suatu renaksi yang disertai dengan konsultasi dengan berbagai pihak – akademisi, pemuda, sektor swasta – yang menelurkan 47 butir renaksi.

Renaksi kali ini juga mengikuti beberapa prinsip dasar dalam penyusunannya:

1. Pertama, OGI memperkuat **Strategi Tiga Trek** untuk memudahkan eksekusi dan komunikasi ke audiens yang berbeda, demi meningkatkan probabilitas kesuksesan. Masing-masing trek tersebut memiliki orientasi yang berbeda-beda: 1) Memperkuat program dan inisiatif pemerintah saat ini, 2) Pengawasan terhadap portal bersama, dan 3) Platform untuk mengakomodasi di tingkat daerah atau inisiatif-inisiatif baru.
2. Kedua, prinsip dalam mendesain Renaksi *Open Government* Indonesia 2014-2015 merupakan bentuk dari penyesuaian tema dari Lead Chairmanship, "**Mempromosikan Partisipasi Publik**". Hal ini telah diterjemahkan ke dalam renaksi yang mendorong partisipasi publik.
3. Ketiga, fokus untuk **memperdalam ke level provinsi dan kabupaten/kota** berdasarkan pemahaman kami bahwa pemerintah daerah (PEMDA) memiliki peran yang penting dari implementasi keterbukaan pemerintah sehingga dapat memiliki dampak langsung kepada kehidupan masyarakat sehari-hari.
4. Terakhir, kami telah mempertimbangkan dengan seksama hasil masukan dari laporan IRM yang diterbitkan tahun 2013, seperti melanjutkan implementasi dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dengan meluncurkan renaksi untuk menyediakan infrastruktur yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap informasi. Adopsi lain dari masukan IRM tersebut juga direfleksikan dengan renaksi yang dijelaskan di dalam dokumen ini.

Kami berharap dengan renaksi ini, perjalanan untuk menuju keterbukaan dan pembangunan tata fondasi dari tata kelola dari pembangunan inklusif yang dicirikan dari masyarakat yang dewasa dan terbuka dapat terwujud. Keterbukaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam menuju tata kelola pemerintahan yang terbuka serta demokratis. Selain itu, keterbukaan merupakan hal yang positif bagi pembangunan Indonesia.

3. PROSES PERUMUSAN RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2014-2015

Publik secara umum dapat melihat dokumen rancangan dan dokumen akhir dari renaksi, tanpa dapat memberikan kritik maupun sarannya secara langsung. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, berbagai terobosan dilakukan dalam proses perumusan renaksi OGI di tahun 2014 ini, yaitu:

1. Transparansi di setiap proses perumusan renaksi OGI 2014-2015.

Terobosan pertama yang Indonesia lakukan adalah dengan mentransparansikan setiap proses perumusan renaksi OGI 2014-2015. Publik secara luas dapat memperoleh akses tidak hanya untuk dokumen rancangan awal dan akhir, tapi juga ke seluruh dokumen hasil berbagai rapat perumusan yang terjadi. Dokumen-dokumen tersebut dapat diakses oleh publik melalui situs OGI (<http://opengovindonesia.org>). Pada dokumen yang dipublikasikan tersebut publik dapat melihat dan mengikuti dinamika proses perumusan renaksi OGI 2014-2015, dimana masukan dan perubahan yang terjadi dapat diawasi secara langsung oleh publik.

2. Mengadakan aktifitas-aktifitas untuk meningkatkan partisipasi aktif dari publik dalam proses perumusan renaksi OGI:

a. Publik dapat memberikan berbagai ide yang mereka miliki melalui Kontes Inovasi SOLUSIMU.

Kontes Inovasi SOLUSIMU merupakan sebuah kompetisi yang menjangkau berbagai ide inovatif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, terutama di bidang anti-korupsi, peningkatan kualitas layanan publik, dan reformasi birokrasi. Kompetisi ini **menjangkau lebih dari 3.200 ide** untuk kemudian dinilai dewan juri, dan selanjutnya ide-ide yang terpilih diikutsertakan kedalam renaksi OGI 2014-2015.

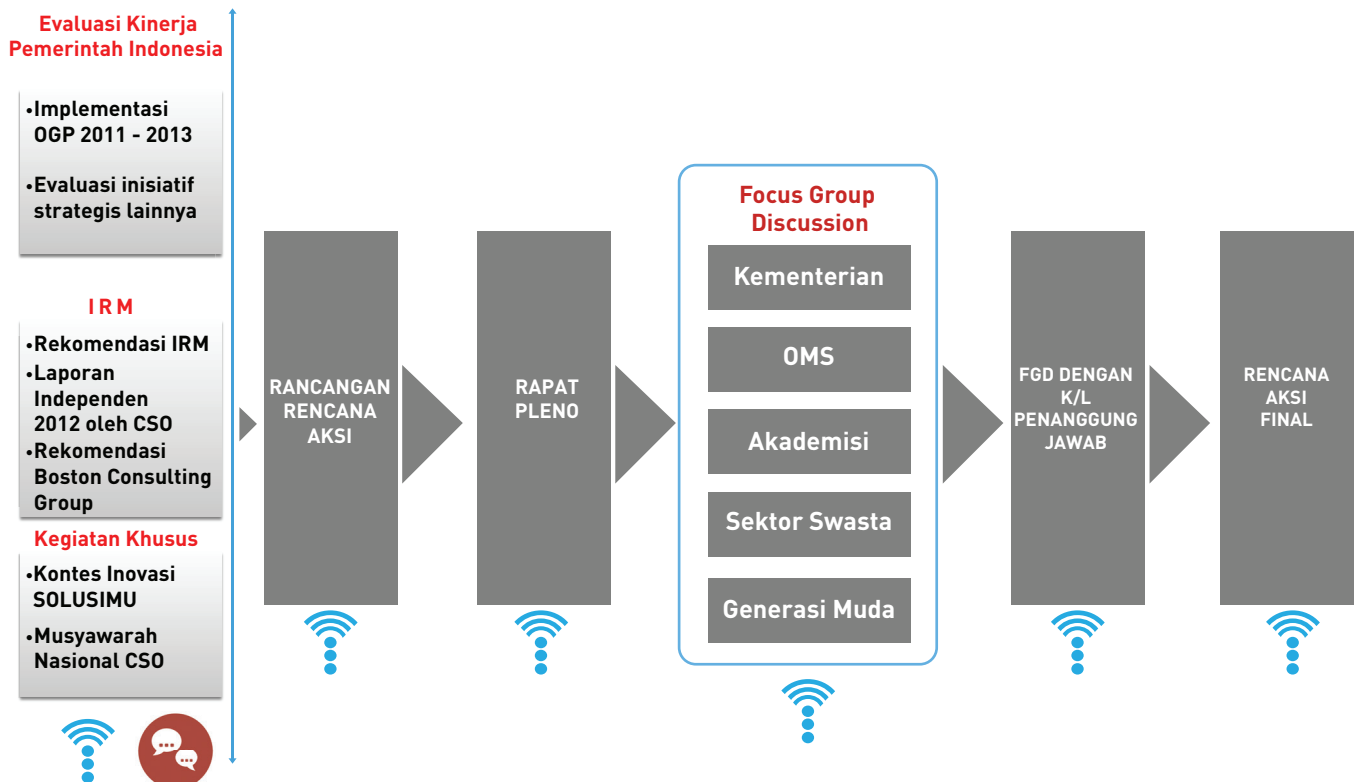
b. Publik Indonesia didorong untuk memberikan opini serta rekomendasinya pada setiap dokumen kerja yang dipublikasikan oleh Sekretariat OGI melalui situs OGI (<http://opengovindonesia.org>).

3. Untuk pertama kalinya generasi muda di Indonesia dilibatkan secara aktif dalam proses perumusan renaksi OGI.

OMS di Indonesia menginisiasi sebuah musyawarah nasional dimana berbagai OMS berkumpul dan berdiskusi yang kemudian menghasilkan rekomendasi OMS untuk renaksi OGI. Kegiatan ini memastikan terjadinya partisipasi publik secara luas, terutama OMS selain yang menjadi anggota Tim Inti OGI.

Gambar 2. Transparansi + Partisipasi Publik dalam Perumusan Rencana Aksi OGI 2014 - 2015

TRANSPARANSI + PARTISIPASI PUBLIK DALAM PERUMUSAN RENCANA AKSI OGI 2014 - 2015



4. STRUKTUR RENCANA AKSI

Untuk periode 2014 – 2015, secara keseluruhan terdapat **47 renaksi OGI** yang telah disepakati dan siap untuk diimplementasikan. Renaksi tersebut dikelompokkan kedalam empat kelompok komitmen. Renaksi tahun 2014-2015 ini akan dilaksanakan oleh 23 institusi pemerintah. Empat kelompok komitmen dirancang untuk meningkatkan kualitas transparansi, partisipasi publik dan layanan umum sebagaimana yang tertera dalam tabel 3 di bawah ini.

Tabel 1. Empat Komitmen Renaksi OGI 2014 – 2015

Empat Kelompok Komitmen	Tantangan Besar OGP*			Jumlah Rencana Aksi	
	1	2	3	Baru	Lanjutan
1. Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik. Renaksi Utama: a. Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data b. Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik	✓	✓		6	1
2. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat. Renaksi Utama: a. Peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut penyediaan air bersih. b. Pengembangan infrastruktur pelayanan terintegrasi untuk keadaan darurat c. Mendorong transparansi di lingkungan universitas/ perguruan tinggi	✓	✓		6	-
3. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi. Renaksi utama: a. Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha b. Penguatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik yang menyangkut pengelolaan TKI	✓	✓	✓	17	2
4. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area yang menjadi perhatian utama publik. Renaksi utama: a. Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah sekitar lokasi pengelolaan sampah b. Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. penyandang disabilitas c. Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif	✓	✓	✓	15	-

* 1) Perbaikan Pelayanan Publik; 2) Meningkatkan Kepercayaan Publik; dan 3) Pengelolaan Sumber Daya Secara Efektif

Berikut adalah penjelasan untuk setiap reaksi di dalam masing-masing kelompok komitmen:

1. Penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan publik.

- a. **Publikasi data bersifat satu atap melalui sistem Portal Open Data.** Portal Data Indonesia sebagai sebuah ruang virtual untuk seluruh data pemerintahan yang tersedia secara bebas dan dapat diakses untuk keperluan umum merupakan suatu prasyarat terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Peningkatan jumlah datasets dan kekinian data yang terbuka dari Kementerian, Lembaga dan Pemda secara konsisten sebagai pemasok data serta pemanfaatan data tersebut oleh para pemangku kepentingan dapat menjadi tolok ukur keberhasilannya. Melalui ketersediaan data yang terbuka dalam Portal Data Indonesia, diyakini layanan publik, inovasi dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih baik. Dalam konteks inilah kehadiran Portal Data Indonesia menjadi penting untuk dipastikan kesinambungannya agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- b. **Mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan kualitas layanan publik.** Meskipun peringkat daya saing Indonesia tahun 2013 versi WEF meningkat dari ranking 50 menjadi 38, pelayanan publik bukanlah faktor yang mendukung hal tersebut. Bahkan, Ombudsman RI menyebutkan keluhan masyarakat terbanyak saat ini menyangkut kinerja layanan publik oleh Pemda. Di sisi lain, dirasakan bahwa peran masyarakat melakukan pengawasan kualitas layanan publik pemerintah makin besar. Untuk itu, pelibatan publik dalam pelaksanaan pemeringkatan kualitas layanan disertai upaya penyebaran best practice layanan publik berprestasi akan mendorong percepatan perbaikan kualitas layanan publik secara merata.

2. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area layanan dasar masyarakat.

- a. **Peningkatan kualitas pelayanan publik menyangkut penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang sehat.** Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dimanfaatkan untuk air minum, penghidupan yang bersih, dan pengusahaan. Namun, kondisi di Indonesia saat ini terhadap akses sanitasi yang layak (termasuk air bersih) baru mencapai 57,53 persen di tahun 2012. Angka ini dicoba untuk ditingkatkan menjadi 62,41 persen pada tahun 2015 dan hingga mencapai 100 persen pada tahun 2019. Untuk mendorong tercapainya angka tersebut, Pemerintah Indonesia telah mempublikasikan data serta peta geospasial lokasi penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang sehat bersih melalui situs pamsimas.org. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dalam penyediaan air minum yang aman dan sanitasi yang sehat.
- b. **Pengembangan infrastruktur pelayanan terintegrasi untuk keadaan darurat.** Indonesia belum memiliki *system helpdesk* layanan darurat/mendesak terintegrasi antara kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran, dll, sebagaimana Amerika memiliki '911'. Begitu sering keluhan masyarakat saat ini menyangkut tidak terlayannya pasien yang membutuhkan penanganan segera oleh RS karena tidak tersedia dokter dan kamar inap. Untuk itu pembangunan dan perluasan call center di area layanan rumah sakit di 3 provinsi menjadi langkah baik perbaikan layanan kesehatan di Indonesia.
- c. **Mendorong transparansi di lingkungan universitas/perguruan tinggi.** Dengan jumlah yang hampir menembus angka 3000, Perguruan Tinggi di Indonesia semakin menjamur dan pengelolaannya menjadi amat penting bagi kualitas layanan publik. UU Pendidikan Tinggi yang terbit di tahun 2012 menyebutkan bahwa keuangan masing-masing Perguruan Tinggi (PT) harus transparan dalam menggunakan anggaran meski persyaratan publikasi anggaran dalam UU tersebut masih bersifat minim. Sayangnya, hingga saat ini belum semua PT Negeri menaati peraturan tersebut. Padahal PT Negeri mendapat dana bantuan operasional pendidikan dari Direktorat Pendidikan Tinggi (Mendikbud) yang di tahun 2014 dianggarkan sebesar 3,2 Triliun.

3. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area rawan korupsi.

- a. **Peningkatan kualitas layanan perizinan usaha.** Peningkatan peringkat daya saing Indonesia tahun 2013 (versi WEF) dari ranking 50 menjadi 38 disebabkan perbaikan infrastruktur dan bukan pelayanan publik. Beragam kendala terjadi, terutama pada kualitas layanan perizinan usaha. Kendala yang terjadi antara lain jumlah perizinan yang banyak belum tersedia dan belum bekerjanya layanan One Stop Service perizinan di daerah (termasuk hotline konsultasi investasi dan usaha). Seiring dengan perbaikan infrastruktur perizinan usaha maka lahir lah inisiasi untuk menyediakan hotline layanan konsultasi investasi dan usaha secara nasional. Saat ini, konsultasi hanya dapat diberikan langsung di kantor perizinan usaha, kedepannya diharapkan fungsi konsultasi tersebut dapat dilakukan secara *online*.
- b. **Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik menyangkut pengelolaan TKI.** Saat ini menurut catatan BNP2TKI terdapat 6,5 juta TKI bekerja dan menyebar di 175 negara. Jumlah tersebut tidak termasuk TKI tidak tercatat yang masuk menggunakan visa turis dan haji. Selama tahun 2013 tercatat 4.180 pengaduan kasus TKI, mayoritas karena TKI ingin pulang ataupun gaji tidak dibayar. Diluar itu, beragam kasus hukum berat seperti pembunuhan dan pencurian selalu muncul tiap tahunnya. Kebutuhan informasi kegiatan TKI akan membantu masyarakat umum melakukan monitoring pelaksanaan program TKI dimaksud.

4. Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi publik, dan pelayanan di area yang menjadi perhatian utama publik.

- a. **Mendorong pemberdayaan publik dalam pengelolaan sampah/limbah dan wilayah di sekitar lokasi pengelolaan sampah.** Berat timbunan sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 200 ribu ton setiap harinya dimana 24 persen dihasilkan melalui pasar tradisional. Jakarta sebagai ibu kota menghasilkan lebih dari 6.500 ton sampah per harinya, dan memiliki 150 pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan biaya yang besar harus dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta untuk mengelola sampah-sampah tersebut. Masalah tersebut mencetuskan sebuah ide yang diinisiasi oleh masyarakat untuk melakukan penghematan biaya operasional sampah melalui pengelolaan sampah di pasar tradisional secara mandiri.
- b. **Mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas.** Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini ada sekitar 1% dari populasi rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta orang. Namun sampai saat ini masih mendapat penanganan yang minim. Sebagai contoh, di Jakarta, Ibukota Indonesia, jumlah penyandang cacat mencapai 163.000 orang namun yang baru tertangani sekitar 20.000 orang. Berangkat dari situasi tersebut, dicetuskanlah renaksi untuk mendorong perhatian pemerintah dan publik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas diantaranya dengan memberikan informasi kepada publik mengenai pelayanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas dan bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut.
- c. **Penguatan layanan publik menyangkut pariwisata dan ekonomi kreatif.** Sebanyak 3,8 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan melalui sektor pariwisata dan 7 persen berasal dari sector ekonomi kreatif. Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi penyumbang devisa ke-empat terbesar bagi Indonesia. Karena kontribusi yang cukup besar itulah, akses informasi terhadap bidang ekonomi kreatif dan pariwisata begitu diperlukan agar dapat meningkatkan nilai inovasi dan pariwisata ke Indonesia.

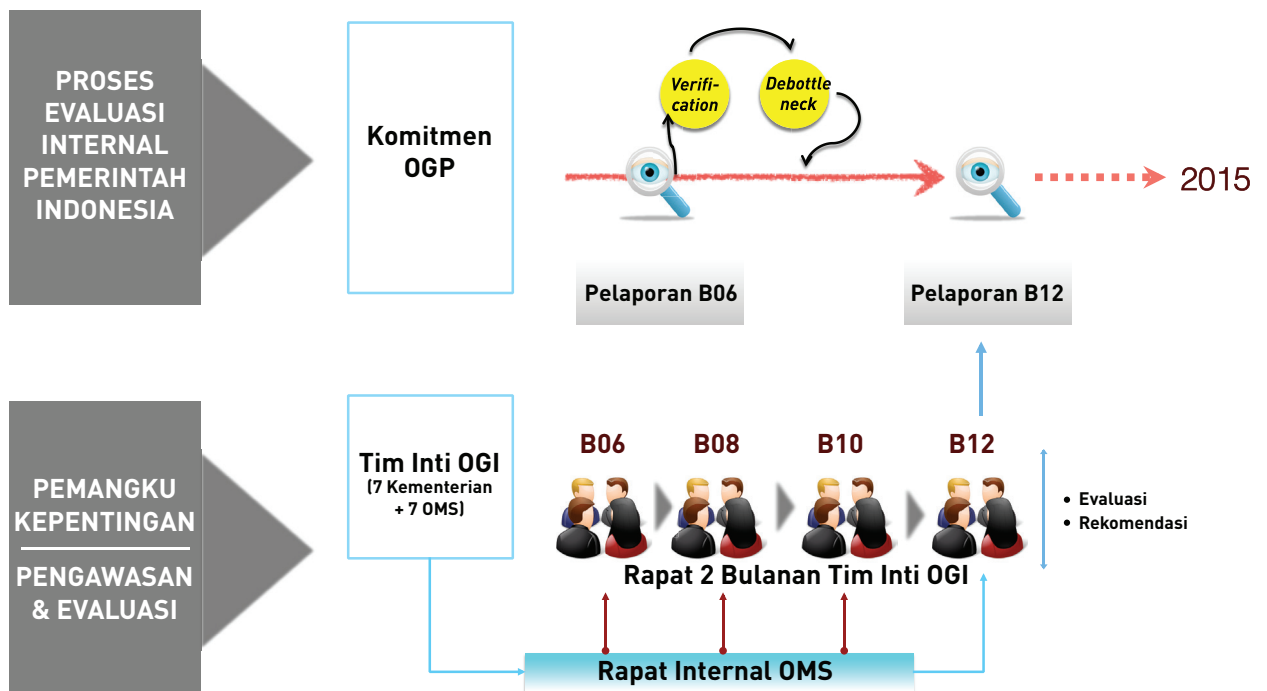
Detail 47 renaksi bisa dilihat pada Lampiran 1

5. PROSES TATA KELOLA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI

Dalam periode 2014-2015, Pemerintah Indonesia mengadakan suatu proses kontrol untuk menjamin kualitas dari implementasi renaksi OGI. Pertama, setiap Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab renaksi OGI diwajibkan untuk mengumpulkan laporan perkembangannya setiap enam bulan, untuk kemudian diverifikasi keabsahannya. Dalam proses verifikasi tersebut, dilakukan proses de-bottlenecking untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Proses de-bottlenecking tidak hanya dilakukan setiap enam bulan, namun dapat juga dilakukan sewaktu-waktu apabila ada masalah yang terjadi dalam proses implementasi renaksi.

GAMBAR 3. TATA KELOLA IMPLEMENTASI RENAksi OGI

2014 - 2015 ACTION PLAN GOVERNANCE



Lampiran 1.

RINCIAN RENAKSI OGI 2014 – 2015

KELOMPOK KOMITMEN 1: PENGUATAN INFRASTRUKTUR KELEMBAGAAN DALAM MENDORONG TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK, DAN PELAYANAN PUBLIK.

Penguatan Infrastruktur Transparansi Badan Publik	
Penanggung Jawab	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Kementerian/Lembaga paham mengenai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi kepada publik sebagai upaya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemenko Kesra melalui situsnya akan mempublikasikan Daftar Informasi Publik (DIP) bersama dengan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk Layanan Informasi Publik. Kemudian Kementerian/Lembaga akan menyediakan informasi publik sesuai dengan yang tertera di DIP tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh publik dengan lebih luas.

Penguatan Infrastruktur Komisi Informasi Pusat dan Daerah	
Penanggung Jawab	Komisi Informasi Pusat (KIP)
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 (UU KIP), setiap badan publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari UU KIP ini adalah Komisi Informasi Daerah (KID) perlu dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, diperlukan pula petunjuk teknis bagi Komisi Informasi dalam mengatur kriteria pemohon informasi publik. Saat ini KID masih belum terdapat di seluruh provinsi, oleh karena itu diperlukan regulasi untuk mempercepat pembentukan KID di provinsi di Indonesia.

Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan SDM Pelayanan Publik	
Penanggung Jawab	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN & RB), Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pengawasan Pembangunan (UKP4)
Jumlah Rencana Aksi	5
Substansi	Dalam meningkatkan pelayanan publik, nilai-nilai open government seperti transparansi dan partisipasi publik menjadi hal yang esensial dalam pengembangannya. Pengembangan Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan akan melibatkan publik di setiap pusat pelayanan publik. Partisipasi publik juga ditingkatkan melalui pengembangan media pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan seluruh provinsi dan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut pengaduan masyarakat. Selain itu publik juga diharapkan untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan keberadaan Portal Open Data yang sedang dikembangkan.

KELOMPOK KOMITMEN 2: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK, DAN PELAYANAN DI AREA LAYANAN DASAR MASYARAKAT

Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan di Bidang Kesehatan	
Penanggung Jawab	Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Jumlah Rencana Aksi	4
Substansi	Kesehatan merupakan hal dasar yang menjadi isu utama di masyarakat. Melalui renaksi ini, Pemerintah Indonesia menguatkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas bidang kesehatan melalui berbagai inovasi. Publikasi data ketersediaan air, pelibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan, integrasikan layanan dasar publik, dan pengembangan sistem layanan darurat menjadi komitmen baru yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Peningkatan Kualitas Keterbukaan dalam Pelayanan di Bidang Pendidikan	
Penanggung Jawab	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud),
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu dari 11 prioritas nasional di Indonesia. Rencana aksi ini termasuk upaya peningkatan transparansi keuangan di manajemen Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Ide inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga bersumber dari ide publik yang tersaring di Kompetisi Inovasi SOLUSIMU. Salah satu usul untuk mengembangkan portal informasi berisikan materi pelajaran untuk guru/dosen akan dilaksanakan melalui OGI. Selain itu, inovasi lain yang dilakukan adalah pengembangan portal informasi tentang ketersediaan peralatan laboratorium di PTN, untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

KELOMPOK KOMITMEN 3: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK, DAN PELAYANAN DI AREA RAWAN KORUPSI

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Penegakan Hukum	
Penanggung Jawab	Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Jumlah Rencana Aksi	4
Substansi	Pemerintah Indonesia bertekad untuk memberantas korupsi melalui berbagai cara, salah satu fokusnya adalah area penegakkan hukum yang difokuskan di aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh POLRI. Berbagai inovasi yang solutif untuk meningkatkan kualitas bidang kepolisian direncanakan di renaksi ini, antara lain: transparansi proses penyelesaian pengaduan masyarakat, pengembangan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas secara <i>online</i> , hingga pemberian informasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	
Penanggung Jawab	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Pengadaan barang dan jasa memang selalu menjadi lima daerah teratas yang rawan tindak korupsi. Dalam renaksi ini, masyarakat diajak untuk melakukan pengawasan bersama. Hal ini diharapkan dapat tercapai melalui penerbitan daftar hitam (<i>blacklist</i>) perusahaan/perorangan oleh pemerintah, yang kemudian dapat dijadikan alat pengawasan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pengembangan Usaha dan Investasi

Penanggung Jawab	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), KemenPAN & RB, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkopukm), Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)
Jumlah Rencana Aksi	6
Substansi	Rencana aksi dalam kategori ini termasuk penyebaran Unit Hubungan Investor ke tingkat provinsi. Informasi terkini dan akurat tentang harga bahan pokok juga akan tersedia di tingkat provinsi. Karena Indonesia sedang mengalami bonus demografi sampai tahun 2035, penempatan fokus untuk memastikan pemuda memiliki akses pada informasi dan infrastruktur untuk membangun kapasitas kewirausahaan menjadi penting dalam membangun kapasitas kewirausahaan.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pertanahan (BPN)

Penanggung Jawab	Badan Pertanahan Nasional
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Pada berbagai kasus, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan peraturan yang jelas mengenai pertanahan (seperti peralihan pembaruan, penggabungan, hingga pemisahan hak atas tanah). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dengan mengeluarkan informasi yang lebih komprehensif kepada publik mengenai regulasi dan data pertanahan. Harapannya adalah agar akses publik terhadap layanan pertanahan dapat lebih ditingkatkan, serta mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi pertanahan.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pengelolaan TKI

Penanggung Jawab	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Permasalahan yang dihadapi TKI adalah belum adanya infrastruktur yang mampu merespon pengaduan secara cepat untuk memberikan perlindungan yang dibutuhkan bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Informasi mengenai lowongan pekerjaan lembaga resmi TKI, prosedur persiapan, serta kelengkapan informasi data TKI akan dipublikasikan melalui situs BNP2TKI. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik pengelolaan TKI, termasuk transparansi dalam status penyelesaian complain.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pengelolaan Haji

Penanggung Jawab	Kementerian Agama (Kemenag)
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Pengelolaan haji dianggap sebagai salah satu pelayanan publik yang rawan tindak pidana korupsi. Untuk mengurangi kekhawatiran akan terjadinya korupsi, Pemerintah Indonesia terus membuat pengelolaan haji lebih transparan, mudah diakses, dan dipahami oleh warga. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan inovasi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas Kantor Urusan Agama (KUA) dalam informasi layanan pernikahan.

Percepatan Praktik Pemerintahan yang Baik dan Terbuka di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Penanggung Jawab	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (KemenkoPereko), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Indonesia memiliki SDA yang begitu besar, baik dari segi energi terbarukan maupun tak terbarukan. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan SDA di Indonesia masih rentan terhadap tindak korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan suap. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus mempromosikan tata kelola yang baik dan terbuka di industri ekstraktif sebagai salah satu industri yang menerapkan standar <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI). Informasi terkait volume produksi industri ekstraktif, renegotiasi Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), pelaksanaan program Tanggung-Jawab Sosial (TJS), dan pelaksanaan pengadaan di sektor hulu migas dan mineral batubara (minerba) akan tersedia bagi publik.

KELOMPOK KOMITMEN 4: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TRANSPARANSI, PARTISIPASI PUBLIK, DAN PELAYANAN DI AREA YANG MENJADI PERHATIAN UTAMA PUBLIK

Peningkatan Partisipasi Publik dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan

Penanggung Jawab	BAPPENAS
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam perumusan rencana pembangunan nasional dan daerah, melalui pendekatan <i>online</i> dan <i>offline</i> . Renaksi ini merupakan hasil salah satu ide dalam Kompetisi Inovasi SOLUSIMU, dimana publik mengusulkan dibentuknya suatu forum terbuka antara publik dengan pemerintah untuk memunculkan inovasi-inovasi baru dari masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah.

Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik di Lembaga DPR/DPD-DPRD

Penanggung Jawab	Sekretariat Jenderal DPR-RI
Jumlah Rencana Aksi	1
Substansi	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk perwakilan dari aspirasi rakyat di tingkat perlemen. Publik berhak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh DPR/DPRD. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari DPR/DPRD dengan mempublikasikan informasi kelembagaan dan mekanisme kerja DPR/DPRD. Nantinya, publik juga dapat mengetahui informasi tentang rapat DPR/DPRD dan dapat memberikan komentar secara langsung.

Peningkatan Kualitas di Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab	Kementerian Lingkungan Hidup (KemenLH)
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Ancaman kerusakan lingkungan yang terus terjadi, rendahnya pengawasan terhadap kondisi lingkungan, dan munculnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah dan sektor swasta merupakan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam melestarikan lingkungan. Atas dasar masalah-masalah tersebut, renaksi di bidang pelestarian lingkungan berkeinginan untuk mendorong pemahaman masyarakat di bidang lingkungan dan juga mengajak publik untuk berdiskusi dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Bermasalah (Miskin, Disabilitas, Berkebutuhan Khusus)

Penanggung Jawab	Kementerian Sosial (Kemensos), Kemenkes,
Jumlah Rencana Aksi	3
Substansi	Rencana aksi ini bertujuan untuk memberikan akses informasi yang mudah kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan infrastruktur kesehatan dan pendukung yang relevan. Pembentukan program berbasis komunitas untuk mendukung orang dengan gangguan jiwa akan dilaksanakan di 10-15 provinsi pada 2015.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Kelestarian Lingkungan Hidup

Penanggung Jawab	KemenLH, Kementerian Pertanian (Kementan), Kemendag
Jumlah Rencana Aksi	3
Substansi	Melalui renaksi ini, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penguatan peran masyarakat dalam pelestarian hutan bakau. Renaksi ini juga bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di pasar tradisional yang banyak tersebar di Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Sektor Pertanian

Penanggung Jawab	Kementan
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Sektor agraris memainkan peran penting dalam perekonomian dimana 30% dari tenaga kerja nasional berada di sektor tersebut. Tantangan yang dihadapi adalah generasi muda mulai banyak yang meninggalkan sektor pertanian. Pemerintah Indonesia bertekad untuk menguatkan sektor pertanian, dengan mengenalkan dunia pertanian pada generasi muda serta mengoptimalkan fungsi Balai Penyuluhan di tingkat kecamatan.

Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Sektor Kreatif

Penanggung Jawab	Kemendikpora, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
Jumlah Rencana Aksi	2
Substansi	Beragam inovasi dilakukan untuk meningkatkan pengembangan masyarakat pada sektor industri kreatif, terutama pemuda dan pariwisata. Renaksi ini mendorong pemuda dalam pemanfaatan ruang khusus untuk kreasi seni grafis. Sektor pariwisata didorong melalui pengembangan wilayah khusus sektor industri batik, serta pengembangan situs dan aplikasi seluler untuk turis yang berisikan informasi wisata di Indonesia.

Lampiran 2.

PENCAPAIAN REKOMENDASI LAPORAN IRM 2011-2013

A. Status Penyelesaian Renaksi 2012 – 2013

Renaksi	IRM		Tanggapan
	Penyelesaian	Rekomendasi IRM	
1. Pengurangan Kemiskinan: Mempublikasikan informasi mengenai alokasi anggaran, rencana pelaksanaan dan hasil-hasilnya di situs, serta menyusun mekanisme partisipasi.	Substansial	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan pelaksanaan yang sedang berjalan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada 2012, upaya dipusatkan untuk membuat informasi mengenai program subsidi beras agar lebih terbuka bagi masyarakat. Informasi tentang penerima beras bersubsidi dipajang di setiap papan pengumuman kecamatan. Evaluasi proses penyaluran beras bersubsidi yang melibatkan masyarakat. Pada 2013, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menggunakan Unified Database masyarakat miskin untuk memastikan program-program mereka—seperti transfer tunai bersyarat, asuransi kesehatan dan beras bersubsidi—tepat sasaran. Basis data TNP2K tersebut mencakup informasi sosial, ekonomi dan data kependudukan sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu yang berada pada kategori kesejahteraan terendah di Indonesia. Kedepannya, TNP2K akan terus melanjutkan, memperkaya dan memperbarui <i>Unified Database</i>. Data dan informasi rakyat miskin harus terus dikumpulkan hingga tingkat pemerintahan daerah untuk memperkuat dan mendukung keterpaduan dengan beragam program pemerintah daerah.

Renaksi	IRM		Tanggapan
	Penyelesaian	Rekomendasi IRM	
2. Subsidi Pendidikan: Mempublikasikan alokasi anggaran, pembayaran dan data pengeluaran.	Substansial	<ul style="list-style-type: none"> Data harus diberikan kepada publik. Peningkatan secara bertahap namun efektif terhadap mekanisme aduan dan transparansi berbasis online. 	<ul style="list-style-type: none"> Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk setiap sekolah (dasar dan menengah) tersedia secara online di http://bos.kemdikbud.go.id dan pengaduan tentang alokasi BOS bisa diarahkan ke http://bos.kemdikbud.go.id/pengaduan Pengaduan umum mengenai program-program pemerintah juga bisa disampaikan ke Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat, atau LAPOR! (melalui SMS atau internet). Melalui LAPOR! setiap aduan akan disalurkan ke Kementerian/Lembaga terkait yang bertanggung jawab untuk menanganinya, baik pada level nasional maupun daerah. Tanggapan lebih lanjut dari institusi terkait dan si pelapor bisa dilacak secara <i>online</i>.
3. Subsidi Bidang Kesehatan: Mempublikasikan alokasi anggaran, data pengeluaran, daftar penerima asuransi kesehatan dan prosedur untuk mendapatkan subsidi.	Substansial	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan data yang lebih terperinci tentang pola-pola pembelanjaan aktual Pembayaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang lebih detail 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan peraturan (No. HK.03.03/BI.1/984/2014 – Transparansi Program BOK) yang mewajibkan Puskesmas atau Kantor-kantor Kecamatan untuk mempublikasikan alokasi dan pembayaran BOK ke klinik-klinik dan area-area yang dituju. Mempublikasikan alokasi dan pelaksanaan BOK untuk setiap kabupaten/kota pada laman situs Kementerian Kesehatan (http://www.gizikia.depkes.go.id/data/publikreport/bok?active=62) Standardisasi data presentasi akan disebarluaskan melalui kebijakan Satu Data yang akan diwujudkan pada 2014.
4. Kepolisian: Mempublikasikan profil institusi dan aparat, biaya dan waktu pelayanan, status perkara dan laporan kinerja tahunan.	Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> Hanya sebagian informasi tersedia di situs Kepolisian Pemerintah perlu memperbaiki sistem pelacakan aduan sehingga publik dapat melihat proses penanganan aduan mereka. 	<ul style="list-style-type: none"> Pada 2013, informasi layanan publik dasar (seperti SIM, STNK dan informasi lalu lintas, dsb.) tersedia di portal SatuLayanan (satulayanan.net) POLRI menyediakan sistem pelacakan aduan meskipun hanya terbatas karena setiap pelapor harus memasukkan formulir aduan secara resmi. Pada 2014-2015, Pemerintah Indonesia akan meneruskan usaha untuk mempublikasikan perkembangan penanganan aduan oleh kepolisian (dengan menyembunyikan identitas pelapor).

Renaksi	IRM		Tanggapan
	Penyelesaian	Rekomendasi IRM	
5. Layanan Perekrutan PNS: Mempublikasikan lowongan, persyaratan, proses perekrutan, kriteria seleksi dan penerimaan. Serta mempublikasikan pengaduan publik dan penyelesaiannya.	Terbatas (catatan: target selesai Des 2013)	<ul style="list-style-type: none"> Melanjutkan pelaksanaan seluruh aspeknya. 	<ul style="list-style-type: none"> Karena pemerintah memutuskan pada awal 2012 untuk menghentikan proses perekrutan PNS, renaksi ini tidak bisa dijalankan sepenuhnya pada 2012. Pada 2013, perekrutan PNS telah diumumkan secara terbuka melalui situs beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah (pemda). Beberapa situs Kementerian dan Pemda bahkan memiliki fitur pengaduan. Proses perekrutan secara terbuka adalah agenda kunci yang selama ini telah didorong baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif dan sekarang telah dimasukkan di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan pada Januari 2014.
6. Administrasi Pertanahan: Mempublikasikan berbagai layanan, prosedur, biaya dan waktu pengerjaan serta status aplikasi.	Substansial	<ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki sistem aduan dan tautannya dengan otoritas sistem pengawasan internal, demikian pula otoritas eksternal yang diberikan kuasa untuk mencegah terjadinya korupsi Memperpendek proses birokrasi dengan menyediakan jasa <i>online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (LAPOR!) telah terhubung dengan lebih dari 80 lembaga pemerintah, dan telah memiliki petugas penghubung di tiap-tiap lembaga. LAPOR! juga terhubung dengan institusi 'eksternal' seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. Saat ini, semua layanan administrasi tersedia online, termasuk peta spasial pertanahan, sistem pelacakan dan simulasi biaya untuk mengurangi interaksi yang kurang efisien antara masyarakat dan petugas pertanahan (http://site.bpn.go.id/o/Layanan-Pertanahan.aspx)
7. Informasi Anggaran Kabupaten: Mempublikasikan anggaran Kabupaten (rencana maupun yang telah disepakati), proyek dan anggaran Kecamatan dan persebarannya.	Substansial	<ul style="list-style-type: none"> Pengumuman detail anggaran daerah Situs perlu diperbaiki secara signifikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pada level provinsi, lebih dari 73% telah mengumumkan detail anggaran, sementara itu pada tingkatan Kabupaten hal ini masih dalam proses dan rencananya akan diselesaikan pada akhir 2014 (sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 2 /2014) Portal lembaga pemerintahan yang mencantumkan informasi kinerja dan anggaran pada level nasional dan daerah sedang dalam penyusunan 2014. Renaksi OGI untuk 2014-2015 akan menyentuh pihak legislatif. Diharapkan pada akhir 2014, DPR akan mempublikasikan pertemuan-pertemuan yang sedang berlangsung, kehadiran dan rangkumannya, dan sebagainya.

B. Tanggapan untuk Rekomendasi Umum IRM

Rekomendasi IRM	Status dan Tanggapan
<p>1. Menyempurnakan OGI sebagai suatu instrumen yang kokoh dalam kerangka keterbukaan yang Pemerintah Indonesia telah lembagaikan melalui UU KIP. Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang diundangkan pada tahun 2008 telah memberi landasan kuat bagi transparansi di Indonesia, namun implementasi UU ini menghadapi banyak sekali batu sandungan. Dengan demikian, OGI perlu mengambil peran untuk mendorong percepatan dan mengatasi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan UU KIP, dengan memanfaatkan OGP sebagai sebuah instrumen internasional yang penting.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pertama dari Strategi Tiga Trek OGI didesain untuk memperkuat dan mempercepat program-program yang sedang dilaksanakan. • Inpres No. 2/2014 – Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 dibentuk agar setiap institusi publik (nasional & sub-nasional) mematuhi UU KIP untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mengembangkan prosedur operasional standar (POS) untuk layanan informasi dan transparansi anggaran. • Sebagai hasil, pembentukan PPID di Indonesia bertumbuh secara cepat dari 13 (2010) hingga 354 unit (2013)
<p>2. Memilih cakupan renaksi yang lebih strategis, ambisius, dan sistemik dalam penyusunan renaksi berikutnya. Penyusunan strategi pada renaksi saat ini (renaksi 2012) memang merupakan tahap pembangunan landasan yang penting, sehingga dapat dipahami jika pemerintah memilih cakupan yang realistis. Ke depan, berdasarkan keberhasilan dalam renaksi pertama, Indonesia perlu menyusun renaksi yang lebih ambisius dalam arti lebih strategis dan sistemik, untuk mempercepat tercapainya kondisi ‘pemerintah terbuka’, melampaui inisiatif-inisiatif di Kementerian/Lembaga yang sudah ada (business as usual) sebelum adanya prakarsa Open Government Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka memulai sebuah inisiatif baru yang strategis, OGI mengejawantahkan fitur ini melalui jalur ke-2 (mengembangkan portal informasi baru) dan ke-3 (merilis proyek percobaan dan inisiatif baru) dari Strategi Tiga Jalur OGI. • Di tahun 2012, OGI mengembangkan Portal SatuLayanan, sebuah portal berbasis komunitas yang memberikan informasi pelayanan publik. Portal SatuLayanan kemudian diluncurkan pada April 2013. Pada akhir tahun 2013, 198 modul layanan informasi telah tersedia dalam jaringan dengan jumlah rata-rata pengunjung hariannya berkisar antara 8.000-12.000 pengunjung. Target yang hendak dicapai adalah memublikasikan 300 modul layanan publik melalui Portal SatuLayanan pada akhir tahun 2014. • Upaya-upaya pengembangan Portal Data Indonesia akan direalisasikan di tahun 2014. • OGI telah memulai gerakan pemerintahan terbuka pada tataran sub-nasional dengan cara melaksanakan tiga solusi keterbukaan di tiga lokasi percobaan yang berada di luar Pulau Jawa (Provinsi Kalimantan Tengah, kota Ambon, dan Kabupaten Indragiri Hulu)
<p>3. Memperdalam sistem keterbukaan melalui penguatan struktur insentif, dibandingkan dengan menyoroti praktik-praktik teladan. Renaksi berikutnya adalah saat dimana OGI harus bergerak lebih maju dari bentuk-bentuk/inisiatif yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga sebelumnya (business as usual), dengan mendorong perubahan sistem insentif di seluruh sistem untuk mendorong perubahan perilaku yang sejalan dengan UU KIP. Namun, karena hampir semua komitmen OGI sampai sekarang lebih menitikberatkan pada penyediaan informasi melalui internet, pemerintah perlu menjajaki saluran-saluran transparansi lainnya, untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbukaan informasi yang didukung oleh gerakan OGI telah dilakukan melalui media <i>online</i> maupun media konvensional. Salah satu bentuk media konvensional yang dilakukan adalah papan buletin. Contoh lainnya yaitu di Kota Ambon, sebagai kota percontohan, telah memublikasikan perencanaan anggaran, anggaran yang telah disahkan, dan anggaran yang telah direalisasikan ke publik melalui perpustakaan umum. • Di tahun 2013, OGI telah melaksanakan dua forum pengetahuan yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta dari berbagai macam institusi pemerintah. Forum pengetahuan dilakukan untuk berbagi ilmu mengenai desain infografis (yang menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum) berdasarkan data informasi mentah pemerintah. Kami percaya peningkatan kapasitas di dalam pemerintahan bermanfaat untuk mengedepankan transparansi ke arah yang lebih baik. • Untuk tahun 2014-2015, OGI hendak memublikasikan performa institusi publik (dari Kementerian, provinsi, kota, dan kabupaten) berdasarkan UU KIP melalui Portal Satu Pemerintah dan situs OGI.

Rekomendasi IRM	Status dan Tanggapan
<p>4. Memperbaiki tata kelola Tim Inti sebagai sebuah lembaga penting di OGI.</p> <p>Berbagai rencana untuk implementasi keterbukaan di Kementerian mengalami kendala yang sistemis, seperti: konflik atas batasan informasi yang dibuka atau dikecualikan. Instansi tersebut memerlukan sebuah lembaga dengan kemampuan koordinasi kuat seperti Tim Inti OGI, untuk membantu mengurangi kendala-kendala tersebut. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu untuk membentuk institusi yang dapat mengelola OGI secara permanen kedepannya, sehingga tidak membuat bergantung dengan hasil pemilihan umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan UU KIP yang merupakan inti dari komitmen OGP, membutuhkan koordinasi yang kuat dan berkelanjutan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Kementerian Dalam Negeri. Di bawah kepemimpinan UKP4, beberapa hambatan pelaksanaan UU KIP tersebut telah berhasil diatasi melalui upaya bersama kedua Kementerian dalam penegasan pembentukan PPID pada tingkat sub-nasional. • Beberapa rencana untuk pengalihan kepemilikan dan manajemen gerakan OGI mulai dilakukan sebagai persiapan untuk kabinet baru yang akan mulai bertugas pada Oktober 2014.
<p>5. Memperdalam sistem transparansi dengan memperkuat insentif dan disinsentif struktural dibandingkan dengan menyoroti upaya-upaya teladan.</p> <p>Banyak pemangku kepentingan menyoroti perlunya perbaikan regulasi mengenai Tim Inti OGI, seperti: proses membuat keputusan. Tim Inti OGI perlu memiliki berbagai perwakilan dari banyak Kementerian dan OMS dalam proses pembuatan keputusan. Pembahasan lebih lanjut dibutuhkan untuk membahas proses memilih perwakilan OMS, mendorong keikutsertaan yang lebih intensif dan luas dari OMS lainnya, serta bagaimana Tim Inti OGI membuat serta melaporkan keputusan sedemikian rupa sehingga memberi posisi yang setara antara OMS dan pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyikapi rekomendasi IRM kedepan, OGI telah meningkatkan jumlah anggota Tim Intinya sejak tahun 2013 dengan memasukkan dua institusi pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) serta tiga OMS dari daerah (Jari Indonesia dari Kalimantan Tengah, GeRAK dari Aceh, dan KOPEL dari Makassar). Saat ini Tim Inti OGI terdiri dari 14 institusi (tujuh pemerintah dan tujuh OMS) dan melakukan satu pertemuan reguler setiap dua bulan. • Selain itu, Sekretariat OMS untuk OGI telah dibentuk guna meningkatkan dan mempercepat komunikasi serta interaksi di antara Tim Inti OGI dan OMS lainnya di Indonesia.

